

A. Buku dan Jurnal

- Ardy, O'ok Mursyd. 2005. *Tinjauan Yuridis Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/1/A/1975 Tentang Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Wni Non Pribumi*. Skripsi S1 Di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta. Tidak Di Publikasikan.
- Atmakusumah. 1982. *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gerungan. 1991. *Psikologi Sosial. Bandung*. Jakarta: PT Eresco.
- Hall, Derek. Philip Hirsch. Tania Murray Li. 2011. *Power Of Exclusion: Land Dilemmas In Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Liliwari, Alo. 2005. *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS.
- Liliwari, Alo. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahfud, Choirul. 2013. *Manifesto Politik Tionghoa Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parsudi, Suparlan. 1993. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sudaryanto, Agus. 2008. Hal 163-177. Hak Dan Kewajiban Abdi Dalem Dalam Pemerintahan Kraton Yogyakarta. *Mimbar Hukum*. Volume 20.

Sulistyaningsih. 2013. *Perlawanan Petani Hutan: Studi Atas Resistensi Berbasis Pengetahuan Lokal*. Bantul: Kreasi Wacana.

Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson. 1979. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Books.

Widodo, Tri. 2000. *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Navilla.

Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Wawancara

- Anton Setyawan (nama samaran), Etnis Tionghoa, 19 Mei 2015, Di Yogyakarta.
- Dahlena, Asisten Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 Oktober 2016, Di Yogyakarta.
- Eni Kusumawati (nama asli), Seorang Etnis Jawa, istri seorang Etnis Tionghoa, 16 Oktober 2016, Di Yogyakarta
- Handoyo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta, 04 Juni 2015, Di Yogyakarta.
- Ir. Z. Siput Lokasari (nama asli), Etnis Tionghoa dan Pendiri Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (GRANAD), 16 Oktober 2016, Di Yogyakarta.

- Suhendra (nama samaran), Etnis Tionghoa, 21 Mei 2015, Di Yogyakarta.
- Veni (nama asli), Sekretaris Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), 23 Oktober 2014, Di Yogyakarta.

C. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. UU No. 12 Tahun 2006. *Kewarga Negara Republik Indonesia.*
3. UU No. 12 Tahun 2011. *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
4. UU No. 23 Tahun 2006. *Tentang Administrai Kependudukan.*
5. UU No. 3 Tahun 1950. *Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.*
6. UU No. 39 Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia.*
7. UU No. 5 Tahun 1960. *Undang-Undang Pokok Agraria.*

D. Surat-Surat

Forum Peduli Tanah Jogjakarta Untuk NKRI No.01/FORPETA/SOMASI/XII/2014
*Tentang SOMASI terkait Diskriminasi Rasial Dalam Kebijakan
Pertanahan/Agraria Di DIY.*

No. 001/GRANAD/IX/2015
*Laporan Tentang Potensi, Indikasi Gerakan Separatis Di DIY kepada
Presiden Republik Indonesia.*

Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K./898/I/A/75. *Tentang
Pelarangan Kepemilikan Tanah bagi WNI Non pribumi.*

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 *Tentang
Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non pribumi Dalam
Semua Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan
Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan
Pemerintahan.*

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 1984 *Tentang
Pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 1984 *Tentang
Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2879/300-34/BPN/2010 *Tentang Tanggapan Permohonan Hak Milik
Atas Tanah.*

Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4325/016-300/XI/2011
Tentang Penyampaian Surat Pengaduan Masyarakat.

Surat Dari Ir. Z. Siput Lokasari Untuk Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY,
Yogyakarta, 14 September 2016. *Tentang Desakan dan Sekaligus Somasi
Agar Gubernur DIY mentaati dan Melaksanakan Rekomendasi Komnas
HAM Agar Tidak Melanggar HAM.*

Surat Dari Ir. Z. Siput Lokasari Untuk Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY,
Yogyakarta, 26 Juli 2016. *Tentang Permohonan Agar Gubernur DIY
Berkenan Mentaati Rekomendasi Komnas HAM Atas Hak Asasi
Manusia.*

Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 037/R/Mediasi/VIII/2014 *Tentang Rekomendasi Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 069/R/Mediasi/VIII/2015 *Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Komnas HAM Terkait Dengan Diskriminasi Hak Atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Surat Dari Ir. Z. Siput Lokasari Untuk Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY, Yogyakarta, 15 Agustus 2016. *Tentang Permohonan Agar Gubernur DIY Mentaati dan Melaksanakan Rekomendasi Komnas HAM Demi HAM dan Mesnsukseskan Program Tax Amnesty Pemerintah.*

Willie Sebastian, 2012 . *Tanggapan Terhadap Balasan Surat Dari Ibu Hendar Susilowati SH PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra Kepala Biro Tata Pemerintahan.* Yogyakarta.

E. Referensi Pendukung

<http://dprd-jogjakota.go.id/index.php/berita-dan-artikel/artikel/membangun-yogyakarta-sebagai-kota-multikultural>. Diakses pada tanggal 26/06/2013. Pukul 21:30 WIB.

<http://indonesia.coconuts.co/2016/04/15/pemerintah-yogyakarta-menolak-kepemilikan-tanah-oleh-etnis-cina-karena-dia-bukan-pribumi> Di Akses 18 oktober 2016 pukul 2:51 WIB.

<http://kbbi.web.id/respons>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fa0a5a5e0f60/masalah-hak-wni-keturunan-tionghoa-untuk-memiliki-tanah-di-yogyakarta>. Diakses pada tanggal 4/6/2013, pukul 15:39 WIB.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**RESPON ETNIS MINORITAS ATAS EKSKLUSI PERTANAHAN YOGYAKARTA Studi Kasus Respon
Penduduk Yogyakarta
Beretnis Tionghoa Dalam Menghadapi Eksklusi Pertanahan Di Yogyakarta Melalui Instruksi Kepala
Daerah Nomor K. 898//A/1975**

IKHSAN ADI KURNIAWAN, Hasrul Hanif, S.IP. M.A.

<https://tirto.id/susahnya-tionghoa-punya-tanah-di-yogya-bQS1> Di Akses 18 oktober 2016 pukul 3:11 WIB.

<https://tirto.id/susahnya-tionghoa-punya-tanah-di-yogya-bQS1> Di Akses 18 oktober 2016 pukul 3:34 WIB.

Notula Kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Perundang-Undangan
Dijelaskan Oleh Dr. Zafullah Salim. M.H. Tanggal 27-28 Mei 2009.
Hotel Lilianto, Kota Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.